

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP KELOMPOK MASYARAKAT PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESTINASI WISATA SITU CILEUNCA KABUPATEN BANDUNG

Analysis of the Impact of Budget Allocation Policy for the Tourism Sector on Sustainable Tourism Community Groups at the Situ Cileunca Tourist Destination, Bandung Regency

Dadan Ramdani

Universitas 'Aisyiyah Bandung

dadan.ramdani@unisa-bandung.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 16, 2025	Jun 13, 2025	Jun 25, 2025	Jun 30, 2025

Abstract

The need to evaluate the extent to which public budget policies impact the empowerment of community groups in sustainable tourism serves as the background for this study, particularly in the Situ Cileunca area of Bandung Regency, which is experiencing growth as a nature-based tourism destination. The objective of this research is to understand the impact of budget allocation policies in the tourism sector on surrounding communities in social, economic, and environmental aspects. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through direct observation and interviews with tourists, local MSME actors/vendors, and non-managing residents. The findings indicate that regional government budget policies have had a positive impact on the development of public facilities and community empowerment, although support remains uneven, especially in the provision of information boards and waste management systems. MSME actors reported increased

income due to the rise in tourist visits; however, most have yet to receive training, outreach, or direct assistance from the government. These findings underscore the need for more responsive budget policies that comprehensively prioritize local community empowerment. The implications of this study include contributions to the literature on sustainable tourism and policy recommendations for tourism development that is more inclusive, adaptive, and socially just.

Keywords: Sustainable Tourism; Budget Allocation; Community Empowerment; MSMEs; Situ Cileunca

Abstrak: Kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan anggaran publik berdampak terhadap penguatan kelompok masyarakat dalam pariwisata berkelanjutan menjadi latar belakang penelitian ini, khususnya di kawasan Situ Cileunca, Kabupaten Bandung, yang mengalami pertumbuhan sebagai destinasi wisata alam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak kebijakan alokasi anggaran sektor pariwisata terhadap masyarakat sekitar dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan wisatawan, pelaku UMKM/pedagang lokal, serta warga non-pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap pengembangan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat, meskipun dukungan belum merata, terutama dalam penyediaan papan informasi dan pengelolaan sampah. Pelaku UMKM merasakan peningkatan pendapatan akibat meningkatnya kunjungan wisatawan, meskipun mereka sebagian besar belum memperoleh pelatihan, sosialisasi, atau bantuan langsung dari pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya penyusunan kebijakan anggaran yang lebih responsif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal secara menyeluruh. Implikasi dari penelitian ini mencakup kontribusi terhadap literatur pariwisata berkelanjutan serta rekomendasi kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Pariwisata Berkelanjutan; Alokasi Anggaran; Pemberdayaan Masyarakat; UMKM; Situ Cileunca

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahma, 2020). Di Indonesia, perhatian terhadap pengembangan pariwisata semakin meningkat dengan adanya berbagai kebijakan atau regulasi dan program pemerintah, termasuk alokasi anggaran khusus untuk mendukung pengembangan destinasi wisata. Pesatnya perkembangan sektor pariwisata turut memberikan efek terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau daerah yang memiliki daya tarik wisata yang dinilai cukup menarik. Dengan demikian, daerah dituntut berperan aktif dalam pengembangan kawasannya serta peran dari masyarakat pun diperlukan agar dapat

memfasilitasi dan mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan saat melakukan kunjungan ke daerah wisata tersebut (Anggarini, 2021).

Secara umum, menurut hasil pengamatan dan pengalaman sebelumnya, wilayah pariwisata yang baik dikunjungi oleh wisatawan adalah daerah yang termasuk dalam kategori Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang terdiri atas wisata alam yaitu tempat-tempat untuk berlibur, beristirahat, dan rekreasi guna kesehatan badan baik untuk jasmani maupun rohani. Dengan kata lain DTW merujuk pada atraksi atau daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Pembangunan dan pengembangan DTW di dalam KSP (Kawasan Strategis Pariwisata) merupakan dua konsep yang saling melengkapi, karena KSP biasanya memiliki beberapa DTW unggulan yang menjadi pusat perhatian wisatawan (Trisnoasih & Turtiantoro, 2019).

Salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang menjadi fokus utama dalam penulisan makalah ini adalah kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pangalengan ditetapkan sebagai KSPD dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan pariwisata pada daerah ini karena memiliki potensi wisata alam dan agrowisata yang menarik, diantaranya keindahan alam yang beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hutan, hingga waduk.

Wisata berupa waduk atau bendungan seperti danau buatan di Pangalengan yang terkenal dengan objek paling populer disana yaitu terdapat di kawasan wisata Situ Cileunca. Situ Cileunca sendiri termasuk kedalam KSPD Kabupaten yang mengusung tema pengembangan produk pariwisata yaitu wisata minat khusus dan agrowisata edukatif dengan sasaran pengembangannya berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata khusus Situ serta agrowisata edukatif dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat dan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi. Situ Cileunca berada $\pm$ 45 km sebelah selatan dari Kota Bandung yang merupakan salah satu Situ yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kawasan Situ Cileunca merupakan lahan milik PT. PLN Persero yang dikelola oleh anak perusahaannya yaitu PT. Indonesia Power atau PTPN VIII. Danau buatan yang luasnya sekitar 1.400 hektar ini berlokasi di ketinggian 1.418 Mdpl dan dikelilingi oleh dua perkebunan teh Malabar. Sebagai destinasi wisata alam dengan keindahan dan keberadaan danau buatan serta berbagai aktivitas wisata yang ditawarkan, seperti perahu, camping, flying fox dan sebagainya menjadikan kawasan Situ Cileunca menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Sehingga, dengan adanya peningkatan jumlah

kunjungan wisatawan tentu terdapat dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan yang turut berubah di kawasan tersebut.

Pengelola kawasan wisata Situ Cileunca memberikan pernyataan dalam sebuah wawancara bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengembangan kawasan wisata, diantaranya: 1. Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata sehingga kawasan ini belum tertata dengan maksimal, seperti belum tersediannya mushola dan toilet yang memadai, dan tempat sampah yang masih kurang. 2. Kuantitas serta kualitas sumberdaya pengelola yang dimiliki masih kurang. 3. Aksesibilitas jalan masuk serta penataan area parkir yang belum ada perbaikan, dan masih terdapat pedagang kaki lima yang belum di relokasi sehingga menimbulkan kurang nyamannya aktivitas pengunjung. 4. Pembangunan dan pengembangan pariwisata di Situ Cileunca belum terlaksana secara terpadu lintas sektor karena belum adanya persepsi yang sama dalam pembangunan dan pengembangannya. 5. Anggaran pengembangan kawasan masih kurang maksimal.

Dengan hal tersebut memberikan informasi bahwa efektivitas alokasi anggaran sektor pariwisata seringkali belum sepenuhnya berdampak positif terhadap masyarakat lokal, khususnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam ekosistem pariwisata berkelanjutan. Permasalahan yang muncul meliputi ketimpangan akses terhadap dana bantuan atau program pemerintah, kurangnya pelatihan dan pendampingan, hingga lemahnya integrasi antara kebijakan publik dengan kebutuhan riil masyarakat di destinasi wisata (Jailani et al., 2023). Padahal, prinsip pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, yang tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana kebijakan alokasi anggaran pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat pariwisata di kawasan Situ Cileunca. Penelitian ini menjadi relevan untuk menjembatani antara aspek kebijakan fiskal daerah dan praktik pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan ke depan. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana kebijakan alokasi anggaran di sektor pariwisata dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, dari adanya wisata Situ Cileunca di Kabupaten Bandung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam dampak kebijakan alokasi anggaran sektor pariwisata terhadap kelompok masyarakat pariwisata berkelanjutan di Situ Cileunca. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial dan persepsi masyarakat lokal secara komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci seperti pelaku usaha pariwisata lokal, aparat desa, pengelola destinasi, dan dinas pariwisata Kabupaten Bandung. Selain itu, observasi lapangan dan dokumentasi kebijakan anggaran turut digunakan sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yaitu dari 27 Mei hingga 19 Juni 2025, dengan lokasi utama di kawasan wisata Situ Cileunca, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020). Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sementara penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi hubungan antarvariabel. Penarikan kesimpulan didasarkan pada pola-pola temuan yang muncul secara konsisten dari hasil wawancara dan observasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sejauh mana kebijakan alokasi anggaran berperan dalam mendukung pengembangan masyarakat pariwisata berkelanjutan di destinasi Situ Cileunca.

HASIL

Berdasarkan penelusuran di lapangan, Salah satu narasumber, Dhani Firmansyah (26th) wisatawan asal Ujung Berung Kota Bandung, menyatakan bahwa alasan utama tertarik mengunjungi Situ Cileunca adalah karena daya tarik alamnya yang masih alami serta udara yang sejuk khas dataran tinggi. Selain itu tersedianya berbagai aktivitas wisata seperti perahu dan camping ground juga menjadi faktor penarik utama. Narasumber menilai untuk fasilitas di kawasan wisata ini sudah cukup memadai. Beberapa fasilitas yang disebutkan antara lain

warung, toilet umum, tetapi ia juga menyebutkan bahwa beberapa fasilitas seperti tempat sampah masih kurang tersebar di beberapa titik dan area parkir yang jauh dari penginapan.

"Saya tertarik datang ke Situ Cileunca karena suasananya masih alami banget, udaranya juga sejuk khas daerah pegunungan. Itu yang bikin saya betah. Selain itu, di sini juga ada banyak aktivitas seru seperti naik perahu dan camping ground yang cukup lengkap. Warung makan ada, toilet umum juga tersedia, jadi cukup nyaman. Tapi memang masih ada kekurangan, seperti tempat sampah yang belum tersebar merata dan area parkir yang lokasinya agak jauh dari tempat menginap," Ungkap Dhani Firmansyah.

Mengenai keberlanjutan lingkungan, narasumber menyampaikan bahwa sebagian besar area terlihat bersih dan ada upaya dari pengelola untuk menjaga kelestarian alam. Meski begitu, kadang masih ditemukan sampah yang berserakan, terutama pada akhir pekan saat pengunjung membludak. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih serius. Menurut narasumber, warga sekitar menyambut baik kehadiran wisatawan. Mereka terlihat ramah dan banyak dari mereka yang membuka usaha kecil seperti warung, jasa perahu, dan penjual oleh-oleh, yang menunjukkan bahwa keberadaan wisatawan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kemudian ia berpendapat bahwa harga tiket, makanan serta souvenir di sekitar Situ Cileunca masih tergolong terjangkau, ini menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi wisatawan lokal dan keluarga. Terakhir, ia menyarankan agar pengelola wisata untuk meningkatkan jumlah tempat sampah dan memperluas penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada warga yang tinggal di sekitar daerah tersebut agar sampah dan limbah rumah tangga tidak mencemari danau.

Selain itu ia juga menambahkan untuk akses jalan yang masih berlubang agar segera diperbaiki secara merata dan harus diperhatikan lagi lebar jalannya untuk kendaraan besar yang lewat seperti bus pariwisata yang kadang kesusahan saat harus melewati tikungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM, Bapak Rudi (42th) dan Ibu Ida (37th), mereka mengakui adanya peluang tambahan dari segi pendapatan sejak kawasan ini menjadi destinasi wisata. Namun demikian, narasumber juga menyebutkan bahwa bantuan dari Pemerintah Daerah masih dirasa kurang, baik dalam bentuk pelatihan usaha maupun dukungan modal. Pelatihan UMKM dan dukungan untuk modal dinilai belum menyentuh langsung kepada para pelaku usaha kecil disana, bantuan seperti pemberian peralatan dan perlengkapan usaha, modal dan sebagainya akan membantu para pedagang terhadap perekonomiannya. Selain itu pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan memudahkan akses wisatawan ke area jualan.

"Sejak Situ Cileunca jadi tempat wisata, alhamdulillah ada peningkatan penghasilan, karena makin banyak wisatawan yang datang, walaupun memang saya belum pernah ikut kegiatan pelatihan atau sosialisasi oleh pemerintah terkait UMKM dan wisata. Adanya ya hanya informasi dari temen-temen atau warga lain bahwa ini dan itu aja," ujar Bapak Rudi.

"Kami merasa terbantu dengan ramainya pengunjung, tapi sayangnya bantuan dari pemerintah daerah masih kurang terasa. Pelatihan usaha dan bantuan modal masih jarang, padahal itu sangat kami butuhkan. Kalau ada bantuan alat jualan atau tambahan modal, pasti sangat membantu pedagang seperti kami. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan juga cukup membantu, karena wisatawan jadi lebih mudah ke area kami berdagang," Ungkap Ibu Ida.

Fasilitas umum yang memadai mendorong kenyamanan wisatawan dan berdampak positif pada jumlah pembelian. Kemudian dari sisi interaksi sosial, narasumber menilai bahwa sebagian besar dari wisatawan bersikap ramah, sopan dan menghargai keberadaan warga lokal saat berbelanja. Hasil wawancara dengan salah satu warga lokal, Siti Aminah (28th) penduduk asli Kampung Cibuluh yang sudah tinggal lama di kawasan tersebut sejak kecil, ia menyatakan bahwa kehadiran wisatawan membawa manfaat terutama melalui peluang kerja dan usaha warung. Namun dibalik manfaat tersebut narasumber menambahkan bahwa adanya dampak perubahan yang dirasakan oleh warga sejak tempat ini ramai wisatawan khususnya dari segi pembangunan seperti vila-vila di kawasan Situ Cileunca yang menurutnya lahan pertanian dialih fungsikan ke pembangunan vila sehingga menyebabkan kelestarian alam tidak seindah seperti dulu. Sehingga limbah yang dihasilkan seperti limbah suara atau kebisingan wisatawan, kemacetan lalu lintas serta permasalahan sampah dari wisatawan yang kurang sadar akan kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan warga harus lebih aktif dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan mereka sendiri.

"Sejak kecil saya tinggal di Kampung Cibuluh, dan sekarang memang terasa sekali perubahannya sejak Situ Cileunca ramai dikunjungi wisatawan. Kehadiran wisatawan memang membawa manfaat, seperti membuka peluang kerja dan usaha warung buat warga sekitar. Sayangnya, sekarang banyak lahan pertanian yang dijadikan vila. Alam yang dulu asri sekarang mulai berubah, tidak seindah dulu lagi. Warga jadi harus lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan, karena tidak semua wisatawan peduli soal kebersihan," Ungkap Ibu Siti Aminah.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kawasan Situ Cileunca mengalami perkembangan, baik secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh pihak swasta dan pemerintah. Beberapa titik wisata yang cukup populer di kawasan ini adalah Jembatan Cinta dan Panorama Ecopark. Jembatan Cinta merupakan jembatan gantung yang menghubungkan dua sisi danau, dan sering dijadikan spot foto oleh wisatawan karena keindahan panoramanya. Sedangkan Panorama Ecopark menawarkan konsep wisata edukatif dan ramah lingkungan dengan wahana outbond (termasuk resort camping), taman alam, serta fasilitas pelestarian lingkungan yang dikelola oleh komunitas lokal maupun swasta, menjadikannya destinasi ramah keluarga yang bernuansa eco-tourism.



Gambar 1. Map Wisata Situ Cileunca

Dari gambar 1 diatas, dijelaskan bahwa dalam konteks pariwisata, kawasan Situ Cileunca memiliki komponen atribut yang dikenal dengan 4A, diantaranya:

1. Attraction Daya tarik utama Situ Cileunca adalah pemandangan danau yang tenang dan dikelilingi perbukitan hijau. Beberapa atraksi yang diminati di Jembatan Cinta yaitu pemandangan alam sebagai ikon swafoto bagi para wisatawan, serta di Panorama Ecopark menyajikan wahana edukatif dan kegiatan outbond bernuansa ekowisata. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati perahu rakit, camping ground, dan sunrise tour. Daya tarik berbasis alam ini menjadi nilai jual utama untuk kawasan ini.
2. Accessibility Akses menuju Situ Cileunca kini semakin mudah dengan adanya perbaikan jalan utama, papan petunjuk arah, serta dukungan transportasi umum dan online. Jalanan menuju lokasi wisata kini sudah dapat dilalui kendaraan dengan sedikit nyaman. Aksesibilitas yang baik menjadi elemen penting dalam menarik banyak wisatawan.

3. Amenities Fasilitas di kawasan ini perlu ditingkatkan, seperti area parkir, toilet umum, mushola, tempat makan serta tempat sampah terpisah. Beberapa titik juga telah dilengkapi penginapan sederhana, seperti homestay dan camping area yang dikelola oleh warga lokal. Penyediaan fasilitas ini turut mendukung kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.

4. Ancillary Service Layanan pendukung seperti pemandu wisata lokal, penyewaan perahu, warung UMKM, serta penyedia jasa dokumentasi dan transportasi wisata kini semakin berkembang, Masyarakat juga ikut terlibat dalam menyediakan layanan ini, yang menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan pemerintah tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga lokal.

Perubahan yang terjadi di kawasan ini merupakan cerminan dari pengaruh kebijakan alokasi anggaran sektor pariwisata. Masyarakat mulai merasakan dampak positif secara ekonomi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun peningkatan jumlah pengunjung juga menimbulkan tantangan baru, seperti pertumbuhan kunjungan wisatawan yang tinggi terutama di musim liburan menyebabkan kepadatan lalu lintas dan peningkatan volume sampah.



Gambar 2. Sosialisasi Pengelolaan Dana dan Wisata Berkelanjutan dengan Masyarakat

Dari gambar 2 diatas maka dapat dilihat terkait sosialisasi pengelolaan dana dan wisata berkelanjutan dengan masyarakat secara perindividu. Selain itu juga adanya beberapa gambaran pengunjung dan juga indahnya wisata. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan secara fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam sistem pengelolaan wisata dan pelestarian lingkungan serta edukasi keberlanjutan. Hal tersebut harus disadari agar kawasan Situ Cileunca dapat terus berkembang secara berkelanjutan, menguntungkan secara ekonomi, serta kelestarian alam dan budaya lokal tetap terus terjaga.

PEMBAHASAN

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi dan keindahan alam semata, melainkan juga tentang bagaimana manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pariwisata memiliki daya dorong strategis terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hingga budaya (Emilia & Nurlela, 2023). Situ Cileunca, sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Bandung, telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah berkat keindahan alam, kesejukan udara, dan ragam aktivitas wisatanya. Namun di balik geliat wisata tersebut, muncul pertanyaan penting, sejauh mana kebijakan alokasi anggaran pemerintah benar-benar menyentuh dan memperkuat kelompok masyarakat lokal sebagai pilar utama pariwisata berkelanjutan. Pertanyaan ini menjadi dasar bagi analisis dalam penelitian ini. Kebijakan fiskal yang tepat dan terarah diyakini dapat memperkuat daya saing destinasi sekaligus memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata (Qodriyatun, 2019).

Dalam hasil penelitian, Pembangunan destinasi Situ Cileunca mengalami peningkatan daya tarik wisata. Cileunca telah mengalami perkembangan signifikan sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bandung. Alokasi anggaran dari pemerintah daerah terlihat pada pengembangan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan menuju lokasi wisata dan pembangunan sarana wisata seperti dermaga perahu dan camping ground. Hal ini menjadi salah satu faktor penarik bagi wisatawan, sebagaimana diungkapkan oleh Dhani Firmansyah, dalam wawancara yang mengapresiasi keindahan alam, udara sejuk, serta ragam aktivitas wisata yang tersedia. Daya tarik alam yang masih alami menjadi modal penting dalam menjaga

keberlangsungan destinasi wisata berbasis alam. Hal ini juga sesuai penelitian (Saputra, 2024) bahwa keindahan wisata yang dikembangkan dan dilengkapi fasilitas yang memadai dan menarik akan menjadi daya tarik wisatawan.

Hal lainnya yang terjadi peningkatan adalah ketersediaan fasilitas walaupun tidak maksimal. Meski fasilitas dasar seperti warung dan toilet umum dinilai sudah cukup memadai, beberapa kekurangan masih perlu mendapat perhatian, seperti kurangnya tempat sampah di beberapa titik strategis dan jarak parkir yang cukup jauh dari area penginapan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan pengunjung secara holistik. Hal ini sesuai menurut Buckley bahwa fasilitas pendukung sangat penting untuk menjamin kenyamanan wisatawan dan mendukung citra positif destinasi, terutama dalam konteks pariwisata berkelanjutan yang juga menuntut pengelolaan limbah secara optimal (Buckley, 2017). Maka dari itu, dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan alokasi anggaran secara maksimal agar mampu sesuai kebutuhan termasuk fasilitas secara keseluruhan.

Dari sisi ekonomi, dampak alokasi anggaran terhadap pelaku UMKM terbilang cukup positif. Wawancara dengan Bapak Rudi dan Ibu Ida menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sebagai dampak dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Usaha kecil seperti warung makan, penyewaan alat camping, dan cinderamata tumbuh seiring dengan meningkatnya mobilitas pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, meskipun masih terbatas. Sehingga tidak heran, dalam penelitian (Pamungkas & Muktiali, 2015) bahwa dari berbagai wisata yang ada, menunjukkan bahwa wisata memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar termasuk UMKM, sehingga disinilah pentingnya pengelolaan yang baik dan berkemajuan wisata kedepan.

Akan tetapi, meski ada peningkatan ekonomi, pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka belum secara langsung merasakan dukungan konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan usaha atau pemberian modal. Bantuan yang bersifat langsung seperti peralatan, pelatihan digital marketing, atau akses permodalan belum merata menyentuh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belum sepenuhnya terimplementasi secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat pariwisata berkelanjutan. Maka dari itulah, penelitian (Murdiastuti, 2018) menyatakan peran pemerintah dan kerjasama

dengan masyarakat dan kelompok atau lembaga sekitar menjadi penting untuk keberlanjutan dan kemajuan wisata.

Selain dampak ekonomi, aspek lingkungan menjadi sorotan penting. Secara peminat wisata memang memiliki kenaikan apalagi setelahnya banyaknya fasilitas seperti pembangun vila dan fasilitas bagi wisatawan. Akan tetapi negative juga terjadi yakni terganggunya kelestarian alam, termasuk kebisingan, sampah, dan kemacetan. Hal ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan destinasi wisata. Jika tidak diantisipasi melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik, maka kualitas ekosistem Situ Cileunca akan terus menurun, berpotensi mengurangi daya tariknya di masa depan.

Analisis terhadap persepsi masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata dan mereka yang tidak. Pelaku usaha di pusat destinasi lebih merasakan dampak ekonomi dibandingkan masyarakat di kawasan penyangga. Hal ini menunjukkan perlunya distribusi anggaran yang lebih merata dan program pemberdayaan yang menysasar semua lapisan masyarakat agar manfaat pariwisata tidak menimbulkan kecemburuan social (Umam, 2025). Selain itu, masalah sampah dan perilaku wisatawan yang kurang peduli terhadap lingkungan menjadi perhatian utama masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan pentingnya edukasi terhadap wisatawan tentang etika berwisata dan kesadaran lingkungan (Marham Jupri Hadi et al., 2022). Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program kampanye wisata ramah lingkungan, penambahan fasilitas kebersihan, dan pelibatan komunitas dalam pengawasan lingkungan.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan, (Ridwan & Aini, 2019) menjelaskan bahwa pemerintah pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever goverment choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga bisa dikatakan peran pemerintah sangatlah penting. Begitupula menurut (Edgell, Sr. & Swanson, 2024) menjelaskan serta menerangkan bahwasanya suatu kebijakan public dri pemerintah setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan. sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hokum, dan sebagai hipotesis, sehingga dengan adanya dimensi tersebut dapat memajukan wisata sesuai tujuan dan kebutuhan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, kebijakan yang bersifat top-down masih dominan, sementara pendekatan partisipatif belum optimal diterapkan. Untuk

mendorong keberlanjutan, pemerintah perlu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengalokasian anggaran, serta menjalin kemitraan erat dengan komunitas lokal secara maksimal.

Selain itu, adanya dukungan regulasi seperti Peraturan Daerah tentang kepariwisataan menjadi landasan hukum yang mengarahkan pembangunan sektor ini secara lebih terstruktur. Pengalokasian anggaran dalam sektor pariwisata tidak hanya ditujukan pada pembangunan fisik, tetapi harus mencakup aspek sosial dan lingkungan, seperti program sadar wisata, edukasi wisata bersih dan pelestarian lingkungan di kawasan wisata Situ Cileunca. Hal tersebut mencerminkan pendekatan sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan) yang menjadi salah satu orientasi utama dalam kebijakan pariwisata saat ini. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Tantangan seperti ketimpangan distribusi anggaran, kurangnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan secara optimal sehingga diperlukan evaluasi berkala dalam pengelolaan pariwisata. Maka dari itu, penelitian (Amriansyah & Bhayu Rhama, 2021) mendukung pentingnya peraturan daerah yang dilandasi kebijakan hukum terkait wisata-wisata di daerah tersebut sehingga menjadi lebih terstruktur dan dana yang masukpun semakin jelas dan sesuai untuk pembangunan.

Hal lain yang penting yaitu partisipasi masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan karena dapat mendukung terkait pembangunan dan keberlanjutan wisata dalam semua aspek sebagaimana penelitian (Nabila & Yuniningsih, 2016) tentang wisata. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan pembangunan wisata masih minim. Sebagian warga, seperti Siti Aminah, menyampaikan bahwa kebijakan tidak selalu melibatkan aspirasi masyarakat lokal, dan UMKM warga. Maka dari itu, untuk mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan sinergi antara para pemangku kebijakan atau stakeholder, pelaksana, dan pengawas dalam setiap strategi pengembangan (Donskova et al., 2022). Dengan demikian, seluruh instansi yang terlibat dapat bekerjasama dan mendukung peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung secara menyeluruh. Integrasi menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan pembangunan kawasan wisata yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Berdasarkan temuan di lapangan diatas maka secara umum, kebijakan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata di Situ Cileunca telah memberikan dampak positif, terutama

dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, kelemahan dalam hal distribusi bantuan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan masih menjadi catatan penting. Ke depan, kebijakan anggaran perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, dan konservasi lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif menjadi kunci untuk mewujudkan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan sebagaimana wisata-wisata lainnya yang berkembang (Jaelani & Rizky, 2023).

Implementasi kebijakan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata di destinasi wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu bentuk implementasi nyata adalah pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, serta fasilitas umum seperti toilet dan dermaga wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan. Langkah ini secara langsung telah meningkatkan daya tarik dan aksesibilitas destinasi, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan sarana wisata seperti area camping ground dan penyewaan perahu turut memperkuat potensi Situ Cileunca sebagai destinasi alam yang kompetitif dan diminati. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar kelompok masyarakat pariwisata berkelanjutan, terutama pelaku UMKM lokal. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mengatasi kekurangan tersebut sehingga nantinya wisata ini dapat menjadi wisata salah satu terbaik yang berdampak positif secara maksimal terhadap warga di sekitar dan pembangunan daerah di bidang wisata.

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa kebijakan alokasi anggaran yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengembangan kawasan Situ Cileunca memberikan dampak yang cukup signifikan, baik dari segi fasilitas umum maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Pembangunan infrastruktur dasar dapat mendukung aktivitas wisata, meski begitu fasilitas penunjang seperti penyediaan papan informasi dan pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan lagi agar ramah lingkungan. Selain itu dampak positif juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil menengah di sekitar kawasan wisata. Meski bagi pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan, sosialisasi, serta bantuan langsung dari pemerintah terkait usaha UMKM, namun secara manfaat mereka memperoleh penghasilan dengan adanya pengunjung yang terus berdatangan. Kemudian, adanya kesadaran dari pengelola untuk menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah kecil positif terhadap arah pengelolaan sustainable tourism.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan lingkungan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan, sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Kesimpulan secara umum implementasi kebijakan pembangunan pariwisata pada kawasan Situ Cileunca, belum berjalan dengan cukup baik, walaupun telah memberikan dampak positif tetapi belum dinilai maksimal, sehingga Untuk mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan sinergi antara para pemangku kebijakan atau stakeholder, pelaksana, dan pengawas dalam setiap strategi pengembangan oleh pemerintah daerah secara detail dan menyeluruh dengan alokasi anggaran dana yang memadai.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang signifikan terhadap pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan alokasi anggaran sektor pariwisata dan dampaknya terhadap masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif dan data lapangan, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata di Situ Cileunca, manfaat ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil pelaku usaha kecil, termasuk minimnya akses terhadap pelatihan dan bantuan modal. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan dampak negatif dari pengembangan pariwisata yang tidak terkendali terhadap lingkungan dan tata ruang lokal. Secara empiris, temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh pendekatan implementasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya ada dua hal yaitu 1) penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada evaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata yang dibiayai oleh anggaran daerah. Penelitian ini dapat menggali lebih dalam sejauh mana program-program pelatihan, bantuan permodalan, serta pendampingan usaha yang diklaim oleh pemerintah daerah benar-benar diterima dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM serta masyarakat lokal lainnya. Evaluasi ini akan memberikan gambaran lebih konkret mengenai keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat komunitas dan menjadi dasar perbaikan mekanisme distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran. 2) melakukan penelitian komparatif antar destinasi wisata berbasis masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung atau daerah lain di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model pengelolaan anggaran, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial-lingkungan dari

pariwisata di berbagai konteks lokal. Dengan pendekatan komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan destinasi, sehingga dapat direplikasi atau diadaptasi di Situ Cileunca maupun destinasi wisata serupa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriansyah, & Bhayu Rhama. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA JASA PERJALANAN WISATA DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.37304/jispar.v8i1.610>
- Anggarini, D. R. (2021). DAMPAK SEKTOR PARIWISATA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH LAMPUNG. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(2), 116–122. <https://doi.org/10.30873/jbd.v7i2.3089>
- Buckley, R. (2017). Sustainable tourism: Research and reality. *Annals of Tourism Research*, 39(2), 528–546. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160738312000230>
- DONSKOVA, L., BARANNIKOV, A., & REDKIN, A. (2022). State regulation of tourism and tourism policy: foreign and Russian experience. *Public Administration*, 24(1), 86–92. <https://doi.org/10.22394/2070-8378-2022-24-1-86-92>
- Edgell, Sr., D. L., & Swanson, J. R. (2024). *Tourism Policy and Planning*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003352242>
- Emilia, E., & Nurlela. (2023). Pentingnya Pelestarian Warisan Budaya Dalam Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JIMA/article/view/648>
- Jaelani, R., & Rizky, M. (2023). Politik Anggaran dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Maratua. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 172–185. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10065>
- Jailani, M., Grindulu, L., Islam, M. H., & Ashady, S. (2023). Optimalisasi Kebijakan Publik Dalam Bidang Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Wisata Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 9(4), 464–473. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.432>
- Marham Jupri Hadi, Lume, & Meiyanti Widyaningrum. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal Of Tourism And Economic*, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.36594/jtec/01a88690>
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (ed.)). SAGE Publications.
- Murdiastuti, R. (2018). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance. *IJDER: International Journal of Economics Development Research*, 3(2), 178. <https://journal.yrpioku.com/index.php/ijedr/issue/view/3>
- Nabila, A. R., & Yuniningsih, T. (2016). Nalisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan

- Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 375–395. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12542>
- Pamungkas, I. T. D., & Muktiali, M. (2015). Pengaruh Keberadaan Desa Wisata Karangbanjar Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, Ekonomi Dan Sosial Masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(3), 361–372. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9085>
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>
- Ridwan, M., & Aini, W. (2019). *Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata*. Deepublish.
- Saputra, I. P. D. A. (2024). Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 207–217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613>
- Trisnoasih, T. M., & Turtiantoro. (2019). Pemberdayaan Masyarakat : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai Motor Penggerak Pariwisata di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Guci Kabupaten Tegal. *Journal of Politic and Government Studie*, 8(2), 181–190. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/23667>
- Umam, K. (2025). ANALISIS PERAN ANGGARAN KEPARIWISATAAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA KEK MANDALIKA. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.114>